



**PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 70 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis DKUMP Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan DKUMP yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;

BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB V : PENUTUP.

- (2) Dokumen Rencana Strategis DKUMP Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA
PONTIANAK TAHUN 2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029, yang di dalamnya tersusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan perekonomian di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan Usaha Mikro di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Perdagangan, Perindustrian, Perkoperasian dan Usaha Mikro di Kota Pontianak.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. LATAR BELAKANG	I.1
1.2. DASAR HUKUM	I.3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I.5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I.5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR	II.1
2.2. SUMBER DAYA	II.3
2.3. KINERJA PELAYANAN	II.7
2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN	II.16
2.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	II.16
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III.1
3.1. TUJUAN DAN SASARAN	III.1
3.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	III.4
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV.1
BAB V. PENUTUP	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jumlah PNS dan PPPK dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang	II-4
Tabel 2.2	: Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal	II-4
Tabel 2.3	: Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Eselon	II-4
Tabel 2.4	: Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja	II-5
Tabel 2.5	: Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 s/d 2025	II-5
Tabel 2.6	: Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan Tahun 2015 s/d 2025	II-5
Tabel 2.7	: Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2011 s/d 2025	II-6
Tabel 2.8	: Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan	II-6
Tabel 2.9	: Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung	II-6
Tabel 2.10	: Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak	II-7
Tabel 2.11	: Tarif Retribusi Pasar Yang Dibina Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak	II-9
Tabel 2.12	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak	II-12
Tabel 2.13	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak	II-14
Tabel 2.14	: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-16
Tabel 2.15	: Teknik Menyimpulkan Isu Strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak	II-18
Tabel 3.1	: Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dkump Pemerintah Kota Pontianak	III-3
Tabel 3.2	: Penahapan Renstra DKUMP Kota Pontianak	III-6
Tabel 3.3	: Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DKUMP Kota Pontianak Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 4.1	: Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra DKUMP Pemerintah Kota Pontianak	IV-3
Tabel 4.2	: Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan DKUMP Kota Pontianak	IV-32
Tabel 4.3	: Rencana Pendapatan dan Penerimaan	IV-76
Tabel 4.4	: Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Dkump Kota Pontianak	IV-77
Tabel 4.5	: Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra DKUMP Kota Pontianak	IV-80
Tabel 4.6	: Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Dkump Kota Pontianak	IV-81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-2
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi DKUMP Kota Pontianak	II-2
Gambar 3.1	: Konsep Renstra PD	III-2
Gambar 3.2	: Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	III-2
Gambar 4.1	: Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

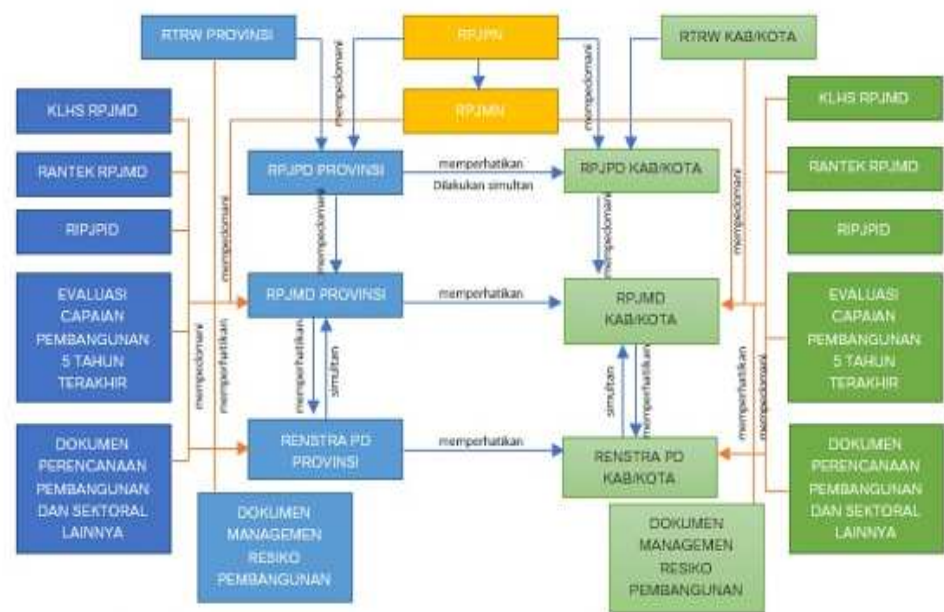
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Kemendagri

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan Perangkat Daerah wajib melakukan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
3. Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
4. Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renstra PD.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk tahun anggaran berikutnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);

15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, urusan pilihan perindustrian dan urusan pilihan perdagangan berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah memastikan bahwa perangkat daerah dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, dengan berpedoman pada visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota memimpin dan mengoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 1. Subbagian Perencanaan; dan
 2. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Bidang Perdagangan
- e. Bidang Pasar;
- f. Bidang Perindustrian;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK



Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan. Sedangkan ruang lingkup sub bagian perencanaan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang keuangan. Sedangkan ruang lingkup sub bagian Keuangan meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi

penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran, dan pembinaan teknis terhadap fungsional keuangan.

2.1.3 Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Koperasi dan U saha Mikro.

Sedangkan ruang lingkup bidang koperasi dan usaha mikro meliputi pembinaan dan pengawasan koperasi dan lembaga keuangan serta bina usaha mikro kecil.

2.1.4 Kepala Bidang Perdagangan;

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang perdagangan. Ruang lingkup bidang perdagangan meliputi logistik dan sarana perdagangan serta pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan.

2.1.5 Kepala Bidang Pasar

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pasar. Ruang lingkup bidang pasar meliputi registrasi dan retribusi pedagang pasar tradisional dan informal serta pembinaan dan penataan sarana prasarana pasar tradisional.

2.1.6 Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Industri.

Sedangkan ruang lingkup bidang industri meliputi sarana dan bimbingan produksi industri, serta pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri.

2.1.7 UPT

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Untuk susunan Pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 Jumlah Pegawai dari segi kepangkatan/golongan ruang, tabel 2.2 Jumlah Pegawai dari segi pendidikan formal , tabel 2.3 Jumlah pegawai

dari segi Jabatan Struktural / Eselon, tabel 2.4 Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja, tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 s/d 2025 , tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dari Tahun 2015 s/d 2025 dan tabel 2.7 perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2011 s/d 2025.

Tabel 2.1.
Jumlah PNS dan PPPK dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembina Utama Muda /IVc	1	0	1
2	Pembina Tk. I /IVb	0	1	1
3	Pembina /IVa	2	2	4
4	Penata Tk I/IIId	3	10	13
5	Penata /IIId	4	3	7
6	Penata Tk I/IIId	3	4	7
7	Penata Muda/IIId	6	4	10
8	Pengatur Tk I/IIId	2	2	4
9	Pengatur/IIId	1	0	1
10	Pengatur Muda Tk I /IId	0	0	0
11	Pengatur Muda/IIId	0	0	0
12	IX	3	5	8
13	VII	1	1	2
14	V	3	0	3
JUMLAH		29	32	61

Sumber : Sekretariat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S2	3	3	6
2	S1	11	22	33
3	D3	5	4	9
4	SMU	10	3	13
JUMLAH		29	32	61

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JABATAN	JUMLAH
1	II B	Kepala Dinas	1
2	III A	Sekretaris	1
3	III B	Kepala Bidang	4
4	IV A	Kepala Seksi/UPTD	5
5	IV B	Ka Sub Bag TU UPTD	3
JUMLAH			14

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja

GOLONGAN JENIS KELAMIN BIDANG	IV/c		IV/b		IV/a		III/d		III/c		III/b		III/a		II/d		II/c		II/b		II/a		IX		VII		V		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L	P	L	P	L	
Sekretariat	1			1			1	3	1	2		1	1	1		2	1												15
Industri						1	1	1	1			1													1				6
Koperasi & UM							1		1			1											3	1					7
Perdagangan					1			1			1		2	2										1					8
Pasar					1			1					1		1								2			1			7
UPT Pasar							1	1					1														1		4
UPT Jasa Usaha Pasar									1				1																2
UPT Metrologi								3		1	2	1		1	1										1		2		12
JUMLAH																													61

Sumber : subbag umum dan aparaturn Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

Tabel 2.5.
Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 s/d 2025

No.	Tahun	Jumlah Pegawai
1	2011	64
2	2012	57
3	2013	57
4	2014	58
5	2015	60
6	2016	60
7	2017	74
8	2018	72
9	2019	65
10	2020	59
11	2021	58
12	2022	52
13	2023	52
14	2024	55
15	2025	61

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

Tabel 2.6.
Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2015 s/d 2025

No.	Golongan	Tahun										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Golongan IV	8	8	10	10	10	8	8	8	8	7	6
2	Golongan III	39	39	45	42	42	39	38	36	35	36	37
3	Golongan II	13	13	18	19	13	12	12	8	7	6	5
4	Golongan I	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Golongan IX	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
6	Golongan VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	Golongan V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

Tabel 2.7.
Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2011 s/d 2025

No	Tingkat Pendidikan	Tahun									2024	2025
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Tamatan S-2	7	7	10	10	9	9	10	9	8	6	6
2	Tamatan S-1	24	24	25	22	25	23	23	23	26	31	33
3	Tamatan D-III	4	4	7	7	6	6	5	5	6	7	9
4	Tamatan SLTA/ sederajat	23	23	31	32	25	21	20	15	12	11	13
5	Tamatan SLTP/ sederajat	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Tamatan SD/ sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		64	57	55	60	72	65	55	52	52	55	61

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8. Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
1.	Kantor	1 Gedung	Baik	
2.	Ruang Kadis	1 Ruang	Baik	
3.	Ruang Sekretariat	1 Ruang	Baik	
4.	Ruang Bid. Perindustrian	2 Ruang	Baik	
5.	Ruang Bid. Perdagangan	2 Ruang	Baik	Bersekut
6.	Ruang Bid. Koperasi & UKM	2 Ruang	Baik	Bersekut
7.	Ruang Bid. Pasar	4 Ruang	Baik	Bersekut
8.	Toilet	4 Ruang	Baik	
9.	Pantri	2 Ruang	Baik	
10	Ruang Arsip	1 Ruang	Baik	
11.	Gudang	2 Ruang	Baik	

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Motor Dinas	3	3	-	-
2	Komputer / PC	63	55	-	8
3	Laptop	7	7	-	-
4	Telepon	1	1	-	-
5	AC Split	19	18	-	1
6	Brangkas	5	3	-	2
7	Mesin Ketik	22	14	5	3
8	Kursi	125	112	-	13
9	Meja Kerja	111	102	-	9
10	Televisi	6	5	1	-
11	Infocus	3	2	-	1
12	Sound System	1	1	-	-
13	Faximile	1	1	-	-
14	Jaringan Internet	7	7	-	-

Sumber : Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

2.2.3. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Tabel 2.10. Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

No	TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
1	2	3
1.	2008	2.544.470.700
2.	2009	2.283.246.057
3.	2010	2.086.648.882
4.	2011	1.993.445.900
5.	2012	4.044.748.000
6.	2013	73.953.727.092
7.	2014	11.468.967.650
8.	2015	7.247.227.760
9	2016	8.097.000.882
10	2017	10.265.115.400
11	2018	9.703.216.346
12	2019	11.055.725.224
13	2020	18.175.314.922
14	2021	12.872.381.707
15	2022	20.413.028.266
16	2023	15.569.370.318
17	2024	16.024.145.688
18	2025	20.952.251.343

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Pelayanan Industri

Pelayanan sektor Industri yang ditangani Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah atau Industri Rumah Tangga (IKM/IRT)

Pembinaan dan pelatihan IKM/IRT merupakan upaya pengembangan potensi unggulan daerah yang mampu meningkatkan kualitas kemampuan IKM/IRT dan nilai tambah serta menumbuhkembangkan IKM/IRT potensial dengan memanfaatkan sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional maupun global.

- b. Pemeriksaan kelayakan perijinan Industri

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui indikasi pencemaran industri, upaya

pencegahan pencemaran industri oleh pelaku usaha industri, kegiatan produksi, mesin/ peralatan yang digunakan membahayakan pekerja, terdapat safety untuk permesinan, kejelasan tentang asal mula bahan baku yang digunakan, komoditi yang dihasilkan membahayakan masyarakat atau ilegal, pekerjaan dilakukan melewati batas kapasitas mesin/peralatan, dan kegiatan produksi industri yang dilakukan mengganggu masyarakat sekitar. Bilamana pada saat pemeriksaan lapangan operasional industri tidak sesuai peraturan maka di rekomendasikan untuk dikaji ulang perizinannya.

2.3.2. Pelayanan Perdagangan

Pembinaan dan pengawasan perdagangan meliputi : Pendataan gudang, Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C, Informasi harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya, serta informasi ketersediaan Stok SEMBAKO dan Barang Penting lainnya. Untuk Informasi Harga Sembako di Kota Pontianak, DKUMP bekerjasama dengan Diskominfo dalam memberikan informasi harga secara digital melalui website ataupun aplikasi JEPIN (Jendela Pontianak Integrasi) pada menu Harga Komoditas.

2.3.3. Pelayanan Pasar

Pelayanan bidang pasar, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan pedagang dengan melakukan monitoring di pasar tradisional, berupa pendekatan secara persuasif kepada pedagang yang melanggar peraturan. Untuk pedagang yang tidak mengindahkan peringatan lisan, akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penindakan.
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana berupa monitoring kebersihan di pasar tradisional.
- c. Secara rutin, setiap bulan dilakukan pembersihan terhadap saluran air yang berada di seluruh pasar rakyat yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
- d. Melakukan pendataan kembali terhadap jumlah pedagang dan PKL yang berada di kawasan pasar tradisional yang akan ditata.
- e. Melakukan penarikan retribusi sewa kios dan los di pasar tradisional.
- f. Melakukan penagihan terhadap pedagang yang menunggak biaya retribusi dan pemanfaatan.

TABEL 2.11
Tarif Retribusi Pasar Yang Dibina Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
Kota Pontianak
Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023

NO.	NAMA PASAR	JENIS	UKURAN (M²)			USULAN NILAI RET	JENIS
			Pjg	Lbr	Luas		
1	Pasar Kapuas Indah LD Blok A,F	Kios	2	2	4	4.000.000	TAHUNAN
2	Pasar Kapuas Indah LD Blok C,D,E	Kios	2	2	4	3.500.000	TAHUNAN
3	Pasar Kapuas Indah LD Blok F(3),F(5)	Kios	2	4	8	6.000.000	TAHUNAN
4	Pasar Kapuas Indah L1 Blok A,B,C,D,E,F	Kios	2	2	4	3.000.000	TAHUNAN
5	Pasar PSP AR Hakim	Kios	2	7,2	14,4	4.500.000	TAHUNAN
6	Pasar PSP Patimura	Kios	1,5	7,2	10,8	8.000.000	TAHUNAN
7	Pasar PSP Patimura	Kios	1,5	4	6	5.500.000	TAHUNAN
8	Pasar Rakyat Tengah Blok Indragiri Barat & Timur	Kios	2	2	4	3.000.000	TAHUNAN
9	Pasar Rakyat Tengah Blok Indragiri Barat & Timur	Kios	1,3	2	2,6	2.500.000	TAHUNAN
10	Pasar Rakyat Tengah Lantai Dasar (Blok Cimandiri; Citarum; Citandui; Ciujung; Ciliwung; Cisadane)	Kios	2,4	2,65	6,36	5.000.000	TAHUNAN
11	Pasar Rakyat Tengah Lantai Satu (Blok Cimandiri; Citarum; Citandui; Ciujung; Ciliwung; Cisadane)	Kios	2,4	2,65	6,36	4.000.000	TAHUNAN
12	Pasar Rakyat Tengah Blok Brantas	Los	1	1,5	1,5	1.500.000	TAHUNAN
13	Pasar Kenanga Keraton	Los	1	1,5	1,5	1.500.000	TAHUNAN
14	Pasar Kenanga Keraton	Kios	2,3	4,6	10,58	1.800.000	TAHUNAN
15	Pasar Kenanga Anggrek	Los	1	1,5	1,5	2.000.000	TAHUNAN
16	Pasar Kenanga Anggrek	Kios	2	3	6	3.500.000	TAHUNAN
17	Pasar Belimbing	Los	1	1,5	1,5	1.500.000	TAHUNAN
18	Pasar Tengah Lantai Dasar – Blok Bukit Timah	Kios	1,95	2,00	3,9	3.500.000	TAHUNAN
19	Pasar Tengah Lantai Satu – Blok Bukit Timah	Kios	1,95	2,00	3,9	2.500.000	TAHUNAN
20	Pasar Cempaka – Lantai Dasar	Los	1,00	1,50	1,5	2.000.000	TAHUNAN
21	Pasar Cempaka – Lantai Dasar	Kios	3,00	3	6	4.000.000	TAHUNAN
22	Pasar Cempaka – Lantai Satu	Kios	2	2,5	5	3.500.000	TAHUNAN
23	Pasar Harapan Jaya	Los	1	1,5	1,5	1.500.000	TAHUNAN
24	Pasar Harapan Jaya	Kios	2,25	4	9	4.000.000	TAHUNAN
25	Pasar Eks Terminal Agribisnis	Los			0	1.500.000	TAHUNAN
26	Pasar Eks Terminal Agribisnis	Kios			0	3.000.000	TAHUNAN
27	Pasar Puring II	Los	1,35	0,8	1,08	2.000.000	TAHUNAN
28	Pasar Parwarsal	Los	1,5	0,8	1,2	2.000.000	TAHUNAN
29	Pasar Parwarsal – Menghadap ke depan/luar	Kios	2	3	6	4.000.000	TAHUNAN
30	Pasar Parwarsal – Menghadap ke dalam	Kios	2	3	6	3.000.000	TAHUNAN
31	Pasar Kemuning Lantai 1	Kios	3,25	2,6	8,45	5.800.000	TAHUNAN
32	Flamboyan	Kios	2	3	6	1.800.000	TAHUNAN
33	Flamboyan	Kios	2	4	8	1.800.000	TAHUNAN
34	Flamboyan	Kios	2	4	12	1.800.000	TAHUNAN
35	Flamboyan	Los	1	1,5	1,5	1.080.000	TAHUNAN
36	Flamboyan	Los	1	2	2	1.080.000	TAHUNAN
37	Puring	Kios	3	3	9	1.800.000	TAHUNAN

NO.	NAMA PASAR	JENIS	UKURAN (M²)			USULAN NILAI RET	JENIS
			Pjg	Lbr	Luas		
38	Puring	Los	1,7	1,2	2,04	1.080.000	TAHUNAN
39	Puring	Los 1/2 Mj	1,2	0,85	1,02	1.080.000	TAHUNAN
40	Teratai LD	Kios	2,6	2	5,2	1.800.000	TAHUNAN
41	Teratai LD	Kios	2,5	3	7,5	1.800.000	TAHUNAN
42	Teratai LD	Kios	3	3	9	1.800.000	TAHUNAN
43	Teratai L1	Kios	2,5	3	7,5	1.800.000	TAHUNAN
44	Teratai L1	Kios	2,5	4,4	11,00	1.800.000	TAHUNAN
45	Teratai L1	Kios	2,5	4,7	11,75	1.800.000	TAHUNAN
46	Teratai L1	Kios	6	5	30	1.800.000	TAHUNAN
47	Teratai LD	Kios	7,5	6	45	1.800.000	TAHUNAN
48	Teratai LD	Los	1,8	1,2	2,16	1.080.000	TAHUNAN
49	Kemuning	Los	0,8	0,9	0,72	1.080.000	TAHUNAN
50	Kemuning	Los	1,34	1,05	1,41	1.080.000	TAHUNAN
51	Kemuning	Los	1,3	1,24	1,61	1.080.000	TAHUNAN
52	Tenda	Unit				70.000	BULANAN
53	Bakulan	Unit				70.000	BULANAN
54	Berdagang di Halaman Pelataran Pasar atau Fasilitas Umum yang telah ditentukan	Lapak				150.000	BULANAN

TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	NAMA PASAR	JENIS	UKURAN (M²)			USULAN NILAI RET	JENIS
			Pjg	Lbr	Luas		
1	Puring_Blok R (2-8,12,13, 23, 25,28,29,30)	Ruko 2L	12	4	96	3.600.000	TAHUNAN
2	Puring_Ruko	Ruko 2 L	12	4	96	3.600.000	TAHUNAN
3	Puring_Blok R (15,16)	Ruko 2 L	12	4	96	3.600.000	TAHUNAN
4	Puring_Blok R (1)	Ruko 2 L	12	4	96	3.600.000	TAHUNAN
5	Puring_Blok R (9)	Ruko 2 L	12	4	96	3.600.000	TAHUNAN
6	Pasar Beras	Toko 1 L	2,5	2	5	3.000.000	TAHUNAN
7	Pasar Beras	Toko 2 L	2,5	2	10	3.600.000	TAHUNAN
8	Pasar Dunia Baru	Toko 3 L	4	4,5	54	4.800.000	TAHUNAN
9	Pasar Parit Pekong	Toko 1 L				3.000.000	TAHUNAN
10	Pasar Parit Pekong	Toko 2 L				3.600.000	TAHUNAN
9	Pasar Sisingamangaraja	Toko 1 L	2	4	8	3.000.000	TAHUNAN
10	Pasar Parit Wan Salim	Toko 2 L	3,7	14	103,6	3.600.000	TAHUNAN
11	Pasar Parit Wan Salim	Toko 3 L	4	10	120	4.800.000	TAHUNAN
12	Stanplat Oto	Toko 3 L	3,7	14	155,4	4.800.000	TAHUNAN
13	Pameran/Promosi di halaman pasar	M²				100.000	HARI

2.3.4. Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro

Pelayanan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

1. Bidang Koperasi
 - a. Penyuluhan Pembentukan Koperasi.
 - b. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi / Badan Hukum Koperasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
 - c. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
 - d. Fasilitasi Penguatan Usaha Koperasi di Sektor Riil.
 - e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi melalui Layanan Bimbingan Teknis.
 - f. Pengembangan SDM Pengurus dan Pengawas Koperasi melalui Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
 - g. Pemberian Penilaian Kesehatan Koperasi.
2. Bidang Usaha Mikro
 - a. Fasilitasi Usaha Mikro melalui Operasional Gedung UMKM Center.
 - b. Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Melalui Pameran Produk Unggulan UMKM.
 - c. Sosialisasi Akses Pembiayaan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Mikro.
 - d. Pengembangan SDM Pelaku Usaha Mikro melalui Pelatihan Kewirausahaan.
 - e. Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - f. Fasilitasi Keikutsertaan Pameran Luar Negeri.

Tabel 2.12

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun			Realisasi Capaian pada Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan				75.00%	80.00%	85.00%	82.53%	-	-	1.10	-	-
1	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	1.00	-	-
II	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil				2.50%	2.60%	2.80%	3.59%	-	-	1.44	-	-
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	1.00	-	-
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait				80.00%	80.00%	85.00%	83.00%	-	-	1.04	-	-
4	Nilai Kelengkapan dan Keterkinian Informasi Industri				90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	-	-	1.00	-	-
III	Persentase Koperasi Aktif				97%	97.50%	98%	94%	-	-	0.97	-	-
5	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam				100%	100%	100%	100%	-	-	1.00	-	-
6	Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan				35%	40%	45%	35%	-	-	1.00	-	-
7	Persentase KSP/USP yang benilai SEHAT				5%	6%	6%	4%	-	-	0.80	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun			Realisasi Capaian pada Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian				35%	40%	40%	35%	-	-	1.00	-	-
9	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi				95%	95%	96%	95%	-	-	1.00	-	-
IV	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru				5%	5.50%	6%	44%	-	-	8.86	-	-
10	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan				2.85%	2.95%	3%	3%	-	-	1.00	-	-
11	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya				0.34%	0.37%	0.42%	3%	-	-	8.82	-	-
V	Persentase tingkat kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya				100%	100%	100%	100%	-	-	1.00	-	-
12	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				100%	100%	100%	100%	-	-	1.00	-	-
13	Persentase Kooefisien variasi harga antar waktu				2%	3%	3%	2%	-	-	1.00	-	-
14	Persentase kinerja realisasi pupuk				60%	60%	70%	70%	-	-	1.17	-	-
15	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina				60%	60%	70%	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun			Realisasi Capaian pada Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				100%	100%	100%	112%	-	-	1.12	-	-
17	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				0.27%	0.40%	0.53%	0.37%	-	-	1.35	-	-

Sumber : Olahan data LAKIP DKUMP Kota Pontianak

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,877,795,496	13,668,401,663	-	11,199,932,951	-	-	0.94	-	-	8,515,399,053.14	3,733,310,983.67
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	21,500,000	21,500,000	-	21,237,200	-	-	0.99	-	-	14,333,333.33	7,079,066.67
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	3,000,000	3,000,000	-	2,421,600	-	-	0.81	-	-	2,000,000.00	807,200.00
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	134,308,800	878,058,000	-	133,317,500	-	-	0.99	-	-	337,455,600.00	44,439,166.67

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	7,729,000	5,500,000	-	7,729,000	-	-	1.00	-	-	4,409,666.67	2,576,333.33
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	13,000,000	13,000,000	-	12,962,500	-	-	1.00	-	-	8,666,666.67	4,320,833.33
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,645,177,459	1,936,878,565	-	1,540,904,500	-	-	0.94	-	-	1,194,018,674.53	513,634,833.33
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	16,000,000	33,407,880	-	12,700,000	-	-	0.79	-	-	16,469,293.33	4,233,333.33
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	532,894,935	342,209,435	-	479,728,662	-	-	0.90	-	-	291,701,456.67	159,909,554.00
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	625,445,600	1,267,000,000	-	275,654,800	-	-	0.44	-	-	630,815,200.00	91,884,933.33
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	191,899,800	282,295,800	-	182,366,022	-	-	0.95	-	-	158,065,200.00	60,788,674.00
14	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	210,541,245	870,000,000	-	164,467,400	-	-	0.78	-	-	360,180,415.00	54,822,466.67
15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	895,730,100	1,591,000,000	-	739,714,684	-	-	0.83	-	-	828,910,033.33	246,571,561.33
16	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	101,915,500	40,000,000	-	82,788,150	-	-	0.81	-	-	47,305,166.67	27,596,050.00
17	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	86,354,400	-	-	80,849,500	-	-	0.94	-	-	28,784,800.00	26,949,833.33
	TOTAL	16,363,292,335	20,952,251,343	-	14,936,774,469							

Sumber : Olahan data Evaluasi Renja DKUMP Kota Pontianak

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak memiliki sasaran layanan yakni Koperasi, pelaku Usaha Mikro, pelaku Industri Kecil Menengah, usaha Perdagangan serta pedagang Pasar Rakyat binaan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DKUMP Kota Pontianak juga diberi dukungan dari Mitra seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), Perum Bulog, Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dll.

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis

2.5.1. Permasalahan

Berikut merupakan permasalahan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak yang bersinggungan langsung dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Daya Saing Ekonomi	Tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi rendah	1. Tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) tingkatan akhir: pasar, pengumpul, grosir dan eceran masih lemah
		Belum optimalnya pengembangan produk unggulan Daerah	1. Belum ada upaya optimal dalam upaya memproduksi, pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah 2. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan PIRT, dll 3. Pelaku industri di Kota Pontianak tumbuh berkembang dengan peralatan/mesin seadanya, penguasaan teknologi, penguasaan desain dan rancang bangun pengembangan industri masih rendah. 4. Perdagangan luar negeri (ekspor) masih didominasi oleh produk hulu (bahan mentah). 5. Minimnya lahan dan terjadi konversi lahan lidah budaya ke fungsi lain.
		Pasar tradisional masih banyak yang belum memenuhi SNI	1. Beberapa pasar yang sudah dibangun namun belum memiliki sarana prasarana pendukung 2. Kebersihan dan Kenyamanan di Pasar Tradisional belum optimal.
		Pembinaan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi yang belum optimal	1. Keterbatasan akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif seperti bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar 2. Rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi, rendahnya partisipasi anggota serta rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif. 3. Penataan UMKM dalam suatu kawasan belum terencana.

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

2.5.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang daerah di masa mendatang. Isu Strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun dapat berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat. Hal tersebut dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Pontianak. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks dengan adanya perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatrend global. Perubahan global tersebut meliputi perubahan transformative berskala besar, berjangka panjang, dan bersifat massif terutama pada kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Beberapa faktor tersebut menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat, sehingga menciptakan tatanan kehidupan baru.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Terdapat sepuluh megatrend global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatrend global ini memiliki dua sisi, yakni memberikan potensi kemajuan bagi sosial ekonomi global, tetapi disisi lain juga berdampak disruptif. Beberapa perubahan tersebut meliputi: (1) Demografi global; (2). Geopolitik dan geoekonomi; (3). Perkembangan teknologi; (4). Urbanisasi dunia; (5). Konstelasi perdagangan internasional; (6). Tata Kelola Keuangan Global (7). Pertumbuhan kelas menengah (8). Persaingan sumber daya alam (9). Perubahan Iklim (10). Pemanfaatan Luar Angkasa. Berikut tabel berisi Isu Strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak :

Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Distribusi Rendah		Peran Perdagangan Internasional Akan Tumbuh 3,4%/Tahun	Hilirisasi Komoditas Unggulan Berbasis Ekspor	Peningkatan Dan Pengembangan Komoditas Unggulan Berbasis Ekspor	1. Perlu Adanya Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Mendukung Pengembangan Komoditas Unggulan Berbasis Ekspor. 2. Ikut Serta Dalam Kegiatan Di Berbagai Event Internasional, Nasional Dan Regional Dalam Upaya Pengenalan/ Promosi Dan Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Khususnya Kegiatan Business Matching Seperti Trade Expo Indonesia (TEI) Dan Kegiatan Lainnya. 3. Pelatihan Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Produk Unggulan Berbasis Ekspor Dalam Upaya Peningkatan Pasar. 4. Perlu Adanya Regulasi Terkait Pemetaan Pengembangan Dan Pembinaan Produk Unggulan Berbasis Ekspor.
	Belum Optimalnya Pengembangan Produk Unggulan		Tujuan SDG's Tahun 2030 Yaitu TPB 8 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi	1. Industrialisasi: Hilirisasi Komoditas Unggulan Hingga Produk Akhir Dan Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Dan Inovasi, Serta Berorientasi Ekspor. 2. Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Pengembangan Pusat-Pusat Industri Di Wilayah Kalimantan Melalui (I) Hilirisasi Komoditi Unggulan (Kelapa Sawit, Batubara, Migas, Dan Hasil Hutan) Dan (Ii) Berbasis Teknologi Tinggi Berkanjutan Seperti Industri Oleochemicals, Petrochemicals, Industri Farmasi Maju, Industri Kendaraan Listrik, Dan Bioteknologi.	1. Permasalahan Ketersediaan Bahan Baku Dalam Mengembangkan Produk Unggulan Daerah 2. Pengolahan Produk Unggulan Daerah Pada Umumnya Masih Bersifat Manual 3. Peningkatan Wawasan Dan Ketrampilan Pengusaha Dalam Pengembangan Produk 4. Pengelolaan Limbah Yang Dihasilkan Dalam Proses Produksi 5. Hilirisasi Industri Harus Memiliki Strategi Untuk Bersaing Dengan Pasar Lokal, Regional Maupun Global

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Pasar Tradisional Masih Banyak Yang Belum Memenuhi SNI		Tujuan SDG's Tahun 2030 Yaitu TPB 12 Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab	1. Program Revitalisasi Pasar Rakyat (Permendag No. 21 Tahun 2021) 2. Penerapan SNI Pasar Rakyat 3. Transformasi Digital (Pembayaran Non-Tunai, Transparansi Retribusi)	1. Banyak Pasar Belum Memenuhi Standar SNI 2. Tuntutan Pasar Higienis, Aman, Nyaman, Ramah Lingkungan	1. Revitalisasi Pasar Rakyat Sesuai SNI 2. Modernisasi Pengelolaan (Kebersihan, Keamanan, Retribusi Digital). 3. Penguatan Daya Saing Pasar Rakyat & Distribusi Produk Lokal.
	Pembinaan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi Yang Belum Optimal		1. UMKM Menghadapi Tekanan Dari Pasar Bebas dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Yang Menuntut Daya Saing Tinggi 2. Persaingan Digital Global Karena Keterbatasan Akses Teknologi dan Literasi Digital 3. Penerapan Prinsip Green Business Atau Produksi Berkelanjutan. 4. Dunia Internasional Mendorong Inklusi Keuangan, Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Komunitas Lokal.	1. Peningkatan Produktivitas UMKM Dan Koperasi. 2. Program Prioritas 14: Melanjutkan Pemerataan Ekonomi Dan Penguatan UMKM Melalui Program Kredit Usaha Dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	1. Membangun Ekosistem Bisnis Lokal Yang Mendukung Ekspor Dan Kemitraan Strategis. 2. Wilayah Yang Lebih Maju Memiliki Akses Transportasi, Logistik, Dan Digital Yang Lebih Baik, Sementara Daerah Tertinggal Kesulitan Mengembangkan UMKM Karena Keterbatasan Infrastruktur. 3. Implementasi Sistem E-Katalog Lokal Dan Sosialisasinya Kepada Pelaku Usaha.	1. Keterbatasan Akses UMKM Dan Koperasi Kepada Sumberdaya Produktif Seperti Bahan Baku, Permodalan, Teknologi, Sarana Pemasaran Serta Informasi Pasar 2. Rendahnya Pemahaman Perkoperasian Oleh Para Pengelola, Pengurus Maupun Anggota Koperasi, Rendahnya Partisipasi Anggota Serta Rendahnya Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Oleh Koperasi Aktif. 3. Rendahnya Kontribusi UMKM Dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi 4. Penataan UMKM Dalam Suatu Kawasan Belum Terencana

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

2.5.2.1. Isu Strategis Bidang Industri

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang industri, sebagai berikut:

- Ketersediaan bahan baku dalam mengembangkan produk unggulan daerah masih menjadi permasalahan umum namun cukup berat dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan yang tersedia dengan karakteristik wilayah yang berkembang sekarang.
- Pengolahan produk unggulan daerah pada umumnya masih bersifat manual belum menggunakan teknologi yang dapat memberikan efisiensi untuk berbagai sumber daya. Penggunaan teknologi selain memberikan dampak efisiensi terhadap berbagai aspek juga akan membantu dalam pengendalian kualitas produk.
- Sdm merupakan salah satu permasalahan yang tidak bisa dilepaskan dari isu dalam mengembangkan produk unggulan daerah. Wawasan dan ketrampilan pengusaha dalam pengembangan produk maupun kewirausahaan masih harus terus ditingkatkan.
- Pengembangan produk unggulan dengan berbagai isu yang harus dicari solusinya memerlukan sinergisitas berbagai pemangku kepentingan dan regulasi yang mendukung, dikarenakan dalam pengembangan produk unggulan ini merupakan tugas dan fungsi dari berbagai lembaga terkait .
- Dalam proses produksi selalu menghasilkan limbah. Munculnya limbah harus dapat dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan, bahkan dengan menggunakan teknologi yang tepat limbah dapat dimanfaatkan untuk sesuai yang memiliki nilai tambah.
- Hilirisasi industri harus memiliki strategi untuk bersaing dengan pasar lokal, regional maupun global. Untuk bersaing maka perlu diperhatikan standar produk, inovasi, maupun aturan terkait produk yang dihasilkan. Ketidakmampuan pemerintah dalam memfasilitasi pemenuhan tersebut dapat berpengaruh terhadap pemasaran produk.

Perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) masih sangat lambat dan hanya berbentuk industri hulu yang relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil.

Penguatan sisi produksi baik itu untuk barang konsumsi sektor primer misalnya pertanian, juga untuk barang-barang industri (olahan) belum optimal.

Banyak pelaku industri yang mengalami kendala dalam pembuatan Izin. Izin Mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk

mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan letak lokasi bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Kendala teknis yang dihadapi pelaku industri dalam pengurusan perijinan yaitu gambar bangunan industri, waktu penyelesaian izin yang belum tepat waktu, diskriminatif dalam proses pengurusan perijinan, tidak transparansi biaya pengurusan ijin, birokrasi yang belum pro-bisnis dan masih ada pungutan liar dalam perijinan industri.

Pelaku industri juga masih kurang peduli dengan arti penting perijinan industri, seperti sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan PIRT. Kegiatan usaha yang berkaitan dengan pangan di Kota Pontianak mencantumkan label halal tanpa mengajukan pendaftaran ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaku industri di Kota Pontianak tumbuh berkembang dengan peralatan/mesin seadanya, penguasaan teknologi, penguasaan desain dan rancang bangun pengembangan industri masih rendah.

Pertumbuhan IRT/IKM terus bertambah, tidak diimbangi dengan jumlah tenaga Pembina di sektor industri, sehingga banyak industri kurang terpantau apakah masih aktif beroperasi, penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman.

Sektor industri masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja yang memiliki rantai pendek sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Industri dimaksud lebih menekankan penggunaan tenaga manusia untuk melakukan pemrosesan tahap awal yang berupa sedikit peningkatan mutu komoditas tanpa mengubah menjadi produk olahan. Dan masalah perburuhan (pesangon, premi Jamsostek, UMR dan lain-lain).

Belum tersedianya perbankan yang khusus ditunjuk pemerintah untuk pembangunan industri per sektor (misalnya: bank khusus untuk agro, untuk industri, untuk migas, untuk IKM, dan lain sebagainya), dengan tingkat bunga kompetitif.

2.5.2.2. Isu Strategis Bidang Perdagangan

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang perdagangan adalah sebagai berikut :

Peningkatan dan pengembangan produk unggulan berbasis ekspor perlu dituangkan kedalam regulasi baik dalam hal pengembangan/peningkatan bahan baku utama dan pendukung, peningkatan kualitas produk dan pembinaan sumber daya pelaku usaha serta upaya peningkatan pasar produk unggulan daerah. Untuk itu kerjasama dan koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan sehingga mulai dari ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku, proses produksi, pengemasan, SDM pelaku usaha, promosi dan pemasaran produk unggulan perlu ditata dan dioptimalkan untuk dapat mendukung secara sinergi pengembangan produk unggulan berbasis ekspor.

Perdagangan luar negeri Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh produk-produk hulu dengan dominasi beberapa komoditi (yaitu karet, kayu). Total nilai dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktuatif dan tergantung pada Negara tujuan ekspor tradisional seperti US, China, Korea, Jepang, dan Singapura).

Penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan akses-akses negatif terhadap perdagangan dalam negeri (merembesnya bahan pangan ilegal dari negara tetangga ke Kalbar seperti gula) dan industri dalam negeri (merembesnya boka ke negara tetangga).

Perdagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi di dalam negeri masih rendah yang ditandai dengan margin distribusi perdagangan dalam negeri juga masih relative sangat berfluktuatif. Hal ini disebabkan karena tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) tingkatan akhir : Pasar, pengumpul, Grosir dan Eceran masih lemah. Kondisi tersebut sangat rawan di kalbar khususnya Pontianak karena produk-produk konsumsi di Pontianak utamanya berasal dari luar (Pontianak) bahkan negara tetangga) . Padahal sistim logistik Kota Pontianak sangat tidak efisien karena pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang tidak layak/memadai. Akibatnya inflasi selalu tinggi (diatas nasional) dan pertumbuhan ekonomi dibawah pertumbuhan nasional.

Kegiatan Perlindungan Konsumen Kalimantan Barat masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah belum operasionalnya lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), belum sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan

pengaduan indikasi/ kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.

2.5.2.3. Isu Strategis Bidang Pasar

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang pasar adalah sebagai berikut :

Pasar rakyat di Kota Pontianak memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok dan wadah penguatan ekonomi lokal. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah sebagian besar pasar tradisional belum memenuhi standar SNI Pasar Rakyat, baik dari sisi sarana prasarana maupun pengelolaan. Kondisi ini menyebabkan pasar tradisional kurang kompetitif dibandingkan pusat perbelanjaan modern dan pasar daring. Sejalan dengan Tujuan SDGs 2030 (TPB 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, Pemerintah Kota Pontianak perlu melakukan strategi revitalisasi pasar agar memenuhi standar SNI, meningkatkan kualitas pengelolaan yang ramah lingkungan, menerapkan sistem transaksi non-tunai, serta memperkuat peran pasar rakyat dalam mendukung konsumsi dan distribusi produk lokal secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta pasar yang higienis, aman, nyaman, ramah lingkungan, dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Tidak tertibnya para pedagang dalam membuang sampah, limbah yang dihasilkan dari aktivitas usaha yang dilakukan pedagang dalam sehari sangat besar dan diperparahkan lagi dengan kebiasaan pedagang yang membuang limbah sembarangan, hal ini akan membuat pasar menjadi kumuh, kotor dan tidak sehat.

Ketidaksesuaian beban kerja antara petugas yang dikontrak dengan luas pasar yang ditangani. Pengelolaan kebersihan pasar diserahkan kepada petugas pekerja harian lepas dengan kontrak dan pembagian petugas tidak sebanding dengan pasar yang ditangani.

Lantai los pasar serta saluran air (drainase) banyak yang rusak serta sumbat sehingga pasar menjadi kumuh dan kotor akibat dari kurang berfungsi IPAL, Pembuatan penutup saluran air secara permanent dari bahan semen cor sehingga jika terjadi penyumbatan saluran tidak dapat diketahui.

Terbatasnya personil pemungut retribusi pasar. Sumber PAD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah retribusi pasar, dan keterbatasan personil membawa dampak realisasi pencapaian target yang ditetapkan.

2.5.2.4. Isu Strategis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan akses UMKM dan koperasi terhadap sumber daya produktif merupakan tantangan besar yang menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka.
- Minim akses ke pembiayaan formal: Sekitar 70% UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan karena kendala administratif dan manajemen keuangan yang masih manual.
- Ketergantungan pada modal sendiri: Banyak pelaku UMKM hanya mengandalkan modal pribadi atau keluarga, sehingga sulit untuk ekspansi usaha.
- Kurangnya pemahaman prosedur: Banyak UMKM belum memahami cara menyusun proposal usaha atau memenuhi syarat lembaga keuangan
- Pasokan tidak stabil: Ketersediaan bahan baku sering kali terganggu, terutama di sektor kuliner dan kerajinan.
- Harga fluktuatif: Perubahan harga yang tidak menentu menyulitkan perencanaan produksi dan pengendalian biaya.
- Ketergantungan pada tengkulak: Beberapa UMKM masih bergantung pada perantara yang menetapkan harga tinggi.
- Akses terbatas ke teknologi canggih: Koperasi dan UMKM umumnya hanya mendapatkan pelatihan teknologi dasar, belum menyentuh teknologi digital yang lebih mutakhir.
- Kurangnya literasi digital: Banyak pelaku usaha belum mampu memanfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional dan pemasaran online.
- Minim infrastruktur promosi: Koperasi belum optimal dalam menyediakan fasilitas promosi dan branding untuk anggotanya.
- Kurangnya akses ke pasar modern: UMKM kesulitan masuk ke pasar retail besar atau ekspor karena keterbatasan kapasitas produksi dan standar kualitas.
- Terbatasnya data pasar: Banyak UMKM tidak memiliki informasi yang cukup tentang tren konsumen, harga pasar, atau kompetitor.
- Kurang dukungan sistem informasi: Belum ada sistem terpadu yang menyediakan data pasar secara real-time untuk pelaku usaha kecil.
- Koperasi hanya dipandang sebagai alat ekonomi: Sebagian anggota mendaftar hanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi, tanpa

memahami peran aktif mereka sebagai pemilik dan pengambil keputusan.

- Kurangnya komunikasi dua arah: Pengurus sering tidak melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan atau tidak menyampaikan informasi secara transparan.
- Tidak ada insentif partisipatif: Anggota tidak merasa ada manfaat langsung dari keterlibatan aktif, sehingga enggan hadir dalam kegiatan koperasi.
- Pengurus tidak memahami pentingnya RAT: RAT seharusnya menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan, namun sering dianggap formalitas belaka.
- Kendala administratif dan teknis: Banyak koperasi tidak memiliki sistem pencatatan keuangan dan keanggotaan yang rapi, sehingga sulit menyusun laporan tahunan.
- Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (low skilled workers) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
- Tersebar secara acak dan tidak terintegrasi. UMKM berdiri di lokasi yang tidak strategis, jauh dari pusat distribusi, pasar, atau infrastruktur pendukung. Tidak ada zonasi khusus untuk jenis usaha tertentu, sehingga sulit membentuk klaster industri.
- Minim sinergi antar pelaku usaha. Tidak ada kolaborasi antar UMKM, koperasi, dan industri besar karena tidak ada sistem yang menghubungkan mereka. Potensi kemitraan dan rantai pasok lokal tidak dimanfaatkan.

Masih banyaknya usaha mikro yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan Luas, terlebih bagi wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur. Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dan

rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif. Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan Legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan-persoalan akut yang perlu segera ditangani. Sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat, karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan.

Koperasi dan UMKM juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kebanyakan SDM Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Langkah perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan kurikulum dan pelaksanaan diklat serta revitalisasi lembaga diklat. Hal ini perlu disadari sedari dini, karena sebagai penopang penciptaan wirausaha baru, jumlah dan keberadaan lembaga pengembangan usaha, Lembaga diklat dan inkubator sangat sedikit dan jauh dan memadai.

Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya. Upaya pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat dan daerah. Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan

UMKM. Terlebih Koperasi dan UMKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan aparatur dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini terdapat kenyataan bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UMKM. Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi karyawan perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 2 (S2-Magister) dan Strata 3 (S3-Doktorat). Keahlian khusus bagi aparatur juga perlu ditingkatkan, khususnya dilakukan diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat aparatur dan diklat motivasi. Searah dengan hal. tersebut, sangat diperlukan sarana dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur di lingkungan Pemerintah Kota yang sangat dinamis. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan bidang perkoperasian dan manajemen usaha.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan aparatur dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam hal ini terdapat kenyataan bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UMKM. Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi aparatur perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 2 (S2-Magister) dan Strata 3 (S3-Doktorat). Keahlian khusus bagi aparatur juga perlu ditingkatkan, khususnya dilakukan pendidikan dan pelatihan pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan aparatur dan pendidikan dan pelatihan motivasi. Searah dengan hal. tersebut, sangat diperlukan sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan Koperasi serta bagi Usaha Mikro. Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur di lingkungan Pemerintah Kota yang sangat dinamis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM di Kota Pontianak serta keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Visi dari Walikota dan Wakil Walikota Pontianak periode 2025 sd 2029 adalah **“MAJU, SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG HUMANIS”**. Kemudian misi yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah Misi ke - 4, yakni **”Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif”**.

Dari Visi dan Misi tersebut ditetapkanlah tujuan DKUMP di dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029, yaitu : **”Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah”**. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator berikut:

1. Proporsi Jumlah Usaha Mikro
2. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
3. Rasio kewirausahaan daerah.
4. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan.
5. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
6. Tingkat Inflasi

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran RPD yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah Meningkatkan produktivitas ekonomi.

Rumusan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Meningkatkan kontribusi Usaha Mikro dalam perekonomian.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha.

2. **Meningkatnya Koperasi Berkualitas.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Persentase Koperasi Berkualitas.

3. **Meningkatnya nilai tambah perdagangan.**

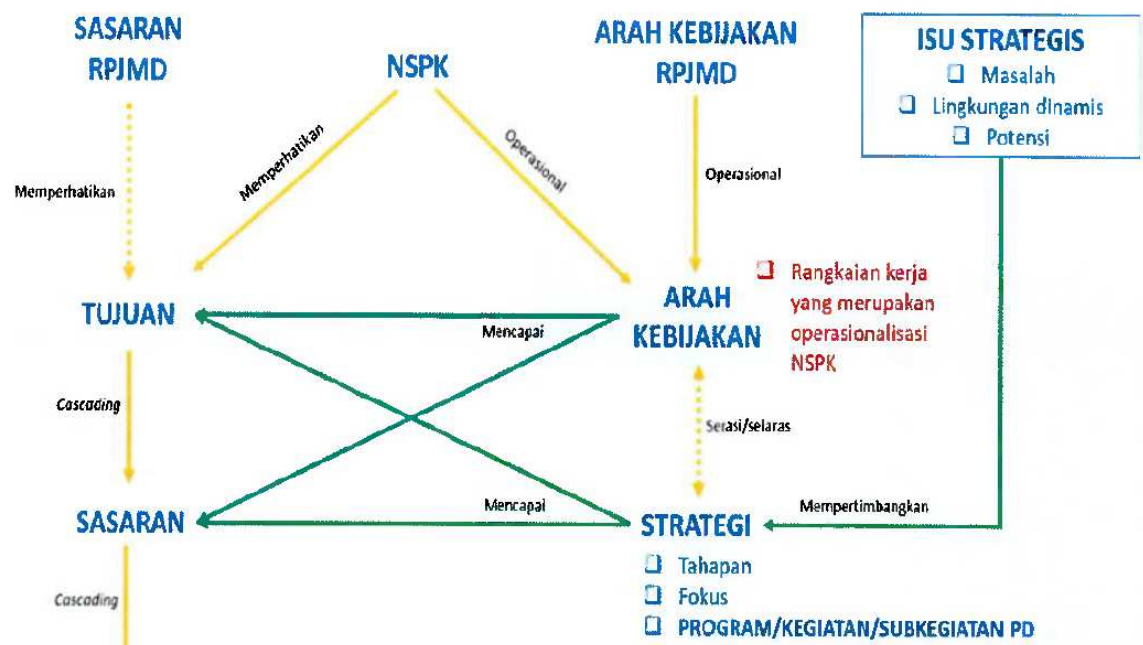
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- Tingkat Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting
- Persentase Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan.

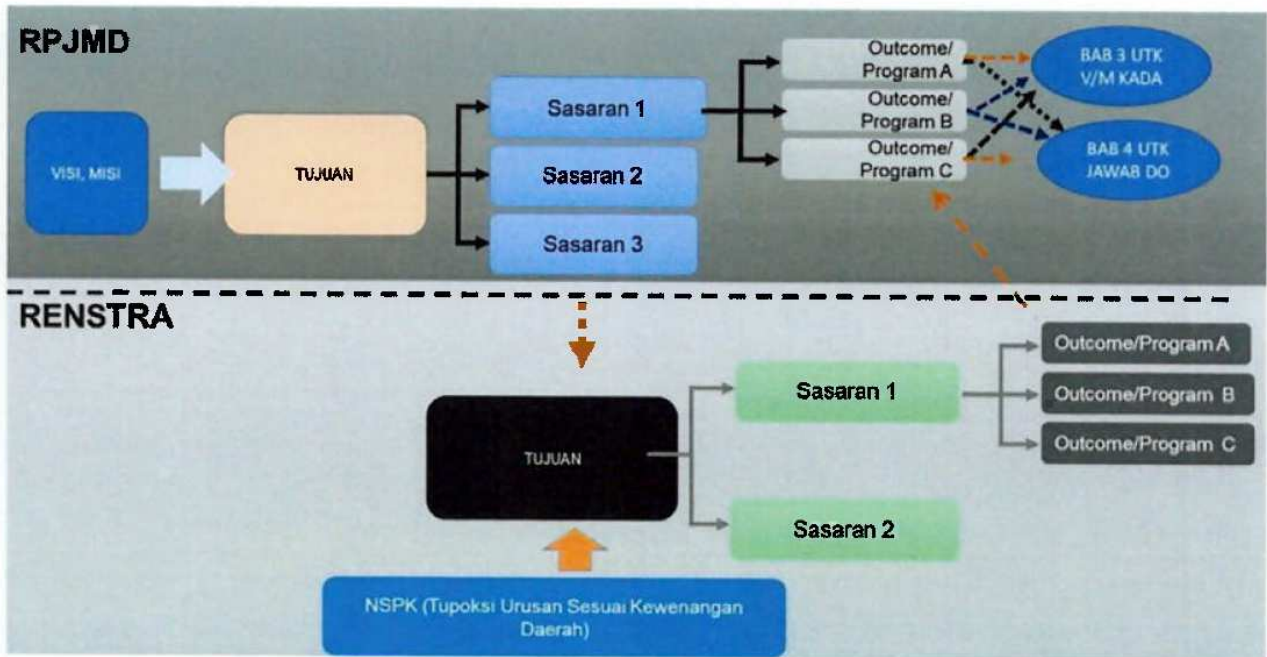
4. **Meningkatnya daya saing industri**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri pengolahan.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DKUMP Kota Pontianak Tahun 2025-2029
dirincikan pada Tabel 3.3 berikut :

**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DKUMP
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN											
- Meningkatkan Produktivitas Ekonomi - Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah		Proporsi Jumlah usaha Mikro (%)	80,56	90	91,25	92,5	93,75	95	95	
			Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	0,215	0,32	0,4	0,47	0,55	0,62	0,68	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,9	4,97	5,04	5,12	5,19	5,26	5,33	
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	15,5	14,55	14,27	13,98	13,7	13,41	12,96	
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	18,48	18,5	18,92	19,42	19,92	20,42	20,92	
			Tingkat Inflasi ((%))	1,58	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
		Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro dalam Perekonomian	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas (%)	84	84	84	85	85	87	87	
		Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Tingkat Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	82,5	83,5	83,5	84,5	84,5	85	85,5	
		Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri pengolahan (%)	23,39	13,88	13,88	15,27	15,27	16,65	16,65	

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

3.2. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan RPJMD Kota Pontianak. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 - 2029 dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka strategi strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro dalam Perekonomian

Strategi:

- a. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro
- b. Pengembangan Usaha Mikro

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Koperasi Berkualitas

Strategi:

- a. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi
- d. Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- c. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- e. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan

Strategi:

- a. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- d. Pengembangan Ekspor
- e. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- f. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
- c. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
- d. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri.
- e. Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat.
- f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- g. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat).
- h. Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat)
- i. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- j. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
- k. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- l. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- m. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- n. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Daya Saing Industri

Strategi :

- a. Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- b. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan sistem informasi Industri Nasional.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah.
- c. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DKUMP Kota Pontianak Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra DKUMP Kota Pontianak

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inisiasi regulasi dalam meningkatkan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	Percepatan implementasi peningkatan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	Pengembangan pembangunan dalam meningkatkan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	Pemantapan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	Penguatan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

Adapun Teknik merumuskan arah kebijakan dalam Renstra DKUMP Kota Pontianak Tahun 2025 s.d. 2029 disajikan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra DKUMP Kota Pontianak Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Inisiasi regulasi pembangunan aglomerasi ekonomi, dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Inisiasi regulasi dalam meningkatkan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	
2		Percepatan implementasi pembangunan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Percepatan implementasi peningkatan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	
3		Pengembangan pembangunan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pembangunan dalam meningkatkan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	
4		Pemantapan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Pemantapan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	
5		Penguatan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Penguatan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah	

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak merupakan turunan dari Program Prioritas yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Pemilihan Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk setiap program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang mengacu pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 pada **Misi IV : “MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN INKLUSIF, STABIL, PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF”**, dengan Tujuan “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berdaya Saing”. Dari Misi dan Tujuan tersebut, ditetapkanlah tujuan dan sasaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai berikut :

Tujuan OPD : Meningkatkan Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah

Indikator :

- Proporsi Jumlah usaha Mikro
- Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
- Rasio Kewirausahaan Daerah
- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
- Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
- Tingkat Inflasi

Sasaran OPD :

1. Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro dalam Perekonomian

Indikator : Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

2. Meningkatnya Koperasi Berkualitas.

Indikator : Persentase Koperasi Berkualitas

3. Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan

Indikator :

- Tingkat Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting
- Persentase Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan

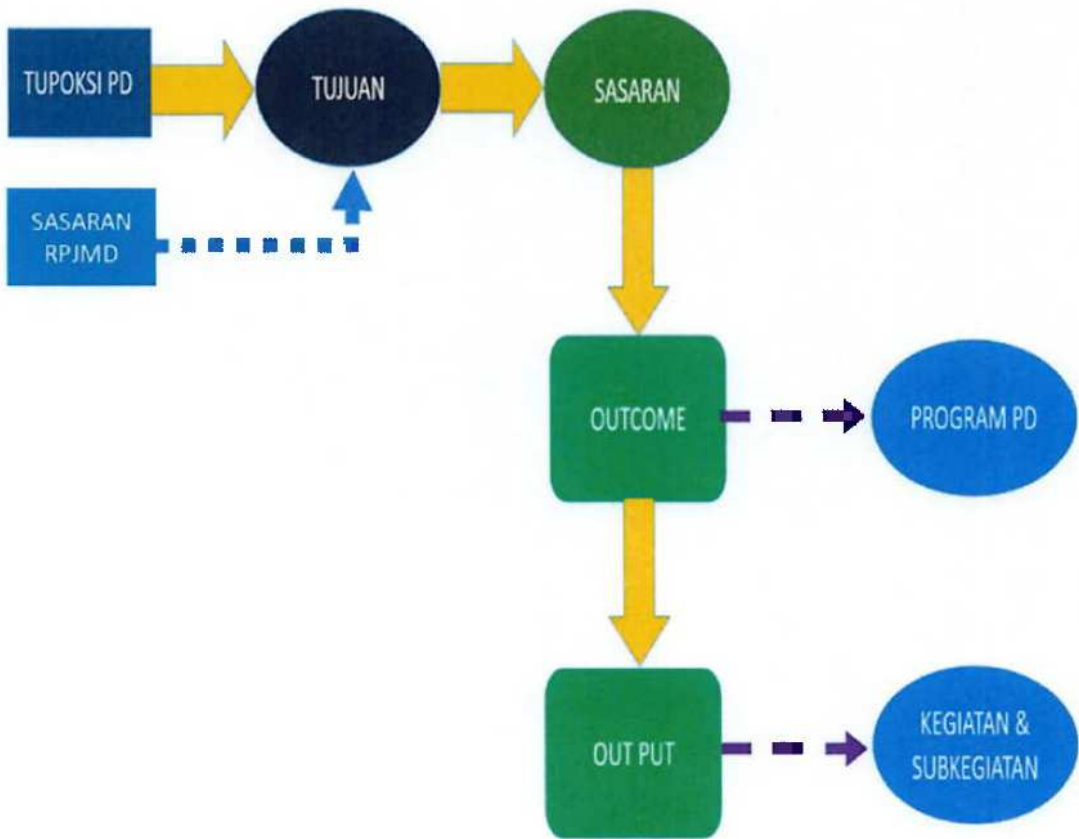
4. Meningkatnya Daya Saing Industri

Indikator : Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri pengolahan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang telah dirumuskan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DKUMP
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN							
- Meningkatnya Produktivitas Ekonomi - Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri dalam Perekonomian Daerah				Proporsi Jumlah usaha Mikro (%)		
					Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)		
					Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
					Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		
					Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)		
					Tingkat Inflasi ((%))		
		Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro dalam Perekonomian			Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%)		
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0009 - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0010 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0012 - Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM		Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	
		Meningkatnya Koperasi Berkualitas			Persentase Koperasi Berkualitas (%)		
			Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.17.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Baik	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.17.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.17.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase Izin Usaha sesuai ketentuan (%)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi		Persentase Kepatuhan Koperasi terhadap Regulasi yang Berlaku (%)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Koperasi, KSP/USP	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian		Persentase Kenaikan Kualitas SDM Pengurus/ Pengawas Koperasi (%)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi		Persentase meningkatnya koperasi yang Sehat (%)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0007 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0008 - Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan			Tingkat Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)		
					Persentase Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan (%)		
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (%)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
				Terfasilitasinya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Terfasilitasinya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Waralaba Dalam Negeri			
					Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03.0001 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terfasilitasinya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
				Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitas terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
				Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase Koefisien variasi harga antar waktu (%)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Meningkatnya Jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor		Persentase Peningkatan Fasilitas Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Ekspor (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Meningkatnya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase peningkatan Fasilitas Pembinaan Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah (%)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Daya Saing Industri			Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri pengolahan (%)		
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Tersusunnya Dokumen RPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian		Persentase Kepatuhan Usaha Industri Kecil Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku (%)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Meningkatnya Izin Industri yang Sesuai Ketentuan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri		Ketersediaan Data Industri Kecil Menengah pada Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- Indikator: Persentase Izin Usaha sesuai ketentuan.
- Kegiatan:
- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- Indikator : Persentase Kepatuhan Koperasi terhadap Regulasi yang Berlaku.
- Kegiatan:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan :

- Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Indikator : Persentase Koperasi Aktif.

Kegiatan:

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Indikator : Persentase Kenaikan Kualitas SDM Pengurus/ Pengawas Koperasi.

Kegiatan:

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Indikator : Persentase Meningkatnya Koperasi yang Sehat.

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
- Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.
- Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Indikator : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
- Pemulihan Usaha Mikro
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
- Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro
- Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
- Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
- Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Indikator : Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya.

Kegiatan:

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Usaha Mikro
- Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
- Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro

8. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Indikator: Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan.

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik.

- b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik

- d. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

- e. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

9. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Indikator : Presentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya.

Kegiatan :

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota
- Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota

- b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Kelompok sasaran: Pasar Rakyat.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

10. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

Indikator : Persentase Koefisien variasi harga antar waktu.

Kegiatan:

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.

- b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

- c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

11. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Indikator : Persentase Peningkatan Fasilitas Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Ekspor.

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kelompok sasaran: alat UTTP

Sub Kegiatan :

- Pameran Dagang Nasional
- Pameran Dagang Lokal

12. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Indikator : Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

Kelompok sasaran: alat UTTP

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

13. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Indikator: Persentase Peningkatan Fasilitas Pembinaan Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

14. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Indikator : Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil.

Kegiatan:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Di Level Kabupaten/Kota

15. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.

Indikator : Persentase Kepatuhan Usaha Industri Kecil Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku.

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

16. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL.

Indikator : Ketersediaan Data Industri Kecil Menengah pada Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kegiatan:

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

17. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

Indikator : Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan.

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- Pengolahan Data Retribusi Daerah

- Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kelompok sasaran: OPD
- Sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kelompok sasaran: OPD
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam proses menjalankan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2025 – 2029 maka ditetapkanlah indikator capaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta Pendanaannya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DKUMP KOTA PONTIANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.341.730.352		16.213.139.783		16.668.621.700		16.868.923.062		16.875.554.925		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.602.793.787		13.153.203.218		13.458.685.135		13.307.986.497		13.421.118.360		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	13.602.793.787	100	13.153.203.218	100	13.458.685.135	100	13.307.986.497	100	13.421.118.360	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.750.000		50.250.000		35.250.000		60.250.000		60.250.000		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektor al Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	45.750.000	1	50.250.000	1	35.250.000	1	60.250.000	1	60.250.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2		2		2		2		2			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.500.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	5.500.000	2	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	5.250.000	5	5.250.000	5	5.250.000	5	5.250.000	5	5.250.000		
2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000		25.000.000		0		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.615.287.532		9.499.010.880		9.607.926.880		9.540.219.880		9.620.742.755		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	-	9.615.287.532	1	9.499.010.880	1	9.607.926.880	1	9.540.219.880	1	9.620.742.755		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65		65		65		65		65			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.309.527.532		9.193.250.880		9.302.166.880		9.234.459.880		9.314.982.755		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65	9.309.527.532	65	9.193.250.880	65	9.302.166.880	65	9.234.459.880	65	9.314.982.755		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				298.760.000		298.760.000		298.760.000		298.760.000		298.760.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	298.760.000	12	298.760.000	12	298.760.000	12	298.760.000	12	298.760.000		
2.17.01.2.02.0004 – Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000		
2.17.01.2.02.0005 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000		
2.17.01.2.02.0006 – Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.01.2.02.0007 – Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	48	48	2.000.000	48	2.000.000	48	2.000.000	48	2.000.000	48	2.000.000		
2.17.01.2.02.0008 – Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.01.2.03 – Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		
Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah dengan Baik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3	9.000.000	3	13.000.000	3	13.000.000	3	13.000.000	3	13.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.17.01.2.03.0001 – Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.01.2.03.0002 – Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
2.17.01.2.03.0003 – Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
2.17.01.2.03.0004 – Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000		
2.17.01.2.03.0005 – Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000		
2.17.01.2.03.0006 – Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000		
2.17.01.2.03.0007 – Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
2.17.01.2.04 – Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terkelolanya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Baik	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	40	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.17.01.2.04.0001 – Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.17.01.2.04.0002 – Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				0		0		0		0		0		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.04.0003 – Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	-	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.01.2.04.0004 – Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		
2.17.01.2.04.0005 – Pengolahan Data Retribusi Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	40	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		
2.17.01.2.04.0006 – Penetapan Wajib Retribusi Daerah				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		
2.17.01.2.04.0007 – Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		
2.17.01.2.05 – Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				135.180.000		139.000.000		139.000.000		154.000.000		139.000.000		
Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	135.180.000	2	139.000.000	2	139.000.000	2	154.000.000	2	139.000.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	10		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-		-		-		5		-			
2.17.01.2.05.0002 – Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				96.180.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	96.180.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
2.17.01.2.05.0003 – Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	18	18	2.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000		
2.17.01.2.05.0005 – Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		
2.17.01.2.05.0009 – Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	10	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000		
2.17.01.2.05.0010 – Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		15.000.000		0		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	0	-	0	-	0	5	15.000.000	-	0		
2.17.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah				518.517.200		524.000.000		574.000.000		555.000.000		556.000.000		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	518.517.200	4	524.000.000	4	574.000.000	4	555.000.000	4	556.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	18		18		20		20		20			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.17.01.2.06.0001 – Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.119.500		15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.119.500	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.17.01.2.06.0002 – Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.317.400		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	89.317.400	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.06.0003 – Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.566.500		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	26.566.500	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
2.17.01.2.06.0004 – Penyediaan Bahan Logistik Kantor				129.391.100		105.000.000		130.000.000		105.000.000		105.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	129.391.100	4	105.000.000	4	130.000.000	4	105.000.000	4	105.000.000		
2.17.01.2.06.0005 – Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				62.122.700		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	62.122.700	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000	4	65.000.000		
2.17.01.2.06.0006 – Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000		
2.17.01.2.06.0007 – Penyediaan Bahan/Material				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.17.01.2.06.0009 – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				155.000.000		160.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	18	155.000.000	18	160.000.000	20	180.000.000	20	180.000.000	20	180.000.000		
2.17.01.2.06.0010 – Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	2.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.06.0011 – Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				36.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	36.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000		
2.17.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				592.550.000		330.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	33	-	592.550.000	1	330.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	-	300.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	10		-		-		-		-			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	1		-		-		-		-			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		-		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	-		1		-		-		-			
2.17.01.2.07.0001 – Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		110.000.000		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	0	1	110.000.000	-	0	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.07.0002 – Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		50.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	1	50.000.000		
2.17.01.2.07.0005 – Pengadaan Mebel				75.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	10	75.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.17.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				240.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	10	240.000.000	10	200.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000		
2.17.01.2.07.0008 – Pengadaan Aset Tak Berwujud				277.550.000		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	1	277.550.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.17.01.2.07.0010 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10.000.000		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	33	-	0	1	10.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.17.01.2.07.0011 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10.000.000		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	-	0	1	10.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.17.01.2.08 – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.394.849.620		2.417.942.338		2.579.508.255		2.460.516.617		2.457.125.605		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.394.849.620	1	2.417.942.338	1	2.579.508.255	1	2.460.516.617	1	2.457.125.605		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.08.0001 – Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000		
2.17.01.2.08.0002 – Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				396.460.200		404.942.338		476.008.255		457.016.617		453.625.605		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	396.460.200	12	404.942.338	12	476.008.255	12	457.016.617	12	453.625.605		
2.17.01.2.08.0003 – Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		10.000.000		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	0	1	10.000.000	-	0	-	0	-	0		
2.17.01.2.08.0004 – Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.995.389.420		2.000.000.000		2.100.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.995.389.420	12	2.000.000.000	12	2.100.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000		
2.17.01.2.09 – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				281.659.435		170.000.000		250.000.000		265.000.000		265.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-	281.659.435	-	170.000.000	-	250.000.000	5	265.000.000	-	265.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	-		-		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		-		-		5		-			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		-		-		-		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40		54		54		54		54			
2.17.01.2.09.0001 – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	-	0	-	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
2.17.01.2.09.0002 – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000		
2.17.01.2.09.0005 – Pemeliharaan Mebel				0		0		0		5.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-	0	-	0	-	0	5	5.000.000	-	0		
2.17.01.2.09.0006 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	55.000.000	54	60.000.000	54	60.000.000	54	60.000.000	54	65.000.000		
2.17.01.2.09.0009 – Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				156.659.435		40.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	156.659.435	4	40.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000		
2.17.01.2.09.0010 – Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		10.000.000		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0	-	0	-	0	5	10.000.000	-	0		
2.17.01.2.09.0011 – Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	5	10.000.000		
2.17.02 – PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha sesuai ketentuan (%)	1,47	1,47	0	1,47	0	1,47	0	1,47	0	1,47	0	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02.2.01 – Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	-	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.02.2.01.0001 – Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	-	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.03 – PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				21.500.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Kepatuhan Koperasi terhadap Regulasi yang Berlaku (%)	13,33	14,44	21.500.000	15,56	22.000.000	16,67	23.000.000	17,78	24.000.000	18,89	25.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.03.2.01 – Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				21.500.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Koperasi, KSP/USP	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	-	-	21.500.000	3	22.000.000	3	23.000.000	3	24.000.000	3	25.000.000		
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	512	474		500		500		500		500			
2.17.03.2.01.0003 – Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0		0		0		0		0		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	-	-	0	3	0	3	0	3	0	3	0		
2.17.03.2.01.0004 – Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				21.500.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	512	474	21.500.000	500	22.000.000	500	23.000.000	500	24.000.000	500	25.000.000		
2.17.04 – PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				3.000.000		5.000.000		17.000.000		25.000.000		30.000.000		
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	18,05	22,06	3.000.000	23,11	5.000.000	24,16	17.000.000	25,21	25.000.000	26,26	30.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.04.2.01 – Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.000.000		5.000.000		17.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	130	150	3.000.000	-	5.000.000	-	17.000.000	-	25.000.000	-	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	-	-		10		25		35		45			
2.17.04.2.01.0001 – Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				3.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	130	150	3.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.17.04.2.01.0003 – Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				0		5.000.000		17.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	-	-	0	10	5.000.000	25	17.000.000	35	25.000.000	45	30.000.000		
2.17.05 – PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				778.058.000		878.058.000		878.058.000		878.058.000		878.058.000		
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Kenaikan Kualitas SDM Pengurus/ Pengawas Koperasi (%)	50	50	778.058.000	50	878.058.000	50	878.058.000	50	878.058.000	50	878.058.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.05.2.01 – Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				778.058.000		878.058.000		878.058.000		878.058.000		878.058.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	350	250	778.058.000	280	878.058.000	280	878.058.000	280	878.058.000	280	878.058.000		
2.17.05.2.01.0001 – Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				778.058.000		878.058.000		878.058.000		878.058.000		878.058.000		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	350	250	778.058.000	280	878.058.000	280	878.058.000	280	878.058.000	280	878.058.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.06 – PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				105.500.000		15.000.000		38.000.000		35.000.000		35.000.000		
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang Sehat (%)	14,71	14,92	105.500.000	15,13	15.000.000	15,34	38.000.000	15,55	35.000.000	15,76	35.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.06.2.01 – Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				105.500.000		15.000.000		38.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	-	7	105.500.000	-	15.000.000	-	38.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000		
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	-	50		-		-		-		-			
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	120	150		150		150		150		150			
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	-	-		-		40		40		40			
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	-	-		-		40		40		40			
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	-	-		1		1		1		1			
2.17.06.2.01.0003 – Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				50.000.000		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	-	7	50.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.17.06.2.01.0004 – Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	-	-	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.17.06.2.01.0005 – Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				5.500.000		15.000.000		23.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	120	150	5.500.000	150	15.000.000	150	23.000.000	150	20.000.000	150	20.000.000		
2.17.06.2.01.0007 – Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	-	-	0	-	0	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000		
2.17.06.2.01.0008 – Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0		0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	-	-	0	-	0	40	5.000.000	40	5.000.000	40	5.000.000		
2.17.06.2.01.0009 – Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		0		0		0		0		
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	-	50	50.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.17.07 – PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				113.000.000		322.000.000		361.000.000		686.000.000		553.500.000		
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru (%)	44,31	39,54	113.000.000	41,2	322.000.000	42,87	361.000.000	44,53	686.000.000	46,19	553.500.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.07.2.01 – Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				113.000.000		322.000.000		361.000.000		686.000.000		553.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	113.000.000	50	322.000.000	50	361.000.000	75	686.000.000	50	553.500.000		
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-		10		10		15		10			
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	-	-		100		100		100		100			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	100	850		900		900		900		900			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	-	-		150		150		200		200			
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	-	-		2.500		2.500		2.500		2.500			
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	-	-		5		5		5		5			
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	-	280		150		150		250		200			
2.17.07.2.01.0002 – Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				0		75.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	-	-	0	150	75.000.000	150	75.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000		
2.17.07.2.01.0003 – Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				0		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	-	-	0	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000		
2.17.07.2.01.0004 – Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				13.000.000		75.000.000		87.500.000		100.000.000		100.000.000		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	100	850	13.000.000	900	75.000.000	900	87.500.000	900	100.000.000	900	100.000.000		
2.17.07.2.01.0005 – Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0		
2.17.07.2.01.0007 – Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				0		25.000.000		25.000.000		55.000.000		30.000.000		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	0	50	25.000.000	50	25.000.000	75	55.000.000	50	30.000.000		
2.17.07.2.01.0008 – Pemulihan Usaha Mikro				0		0		5.000.000		0		0		
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	0	-	0	10	5.000.000	-	0	-	0		
2.17.07.2.01.0009 – Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				0		16.000.000		17.500.000		25.000.000		17.500.000		
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	0	10	16.000.000	10	17.500.000	15	25.000.000	10	17.500.000		
2.17.07.2.01.0010 – Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro				0		0		5.000.000		0		0		
Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	0	-	0	5	5.000.000	-	0	-	0		
2.17.07.2.01.0012 – Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				0		0		2.000.000		0		0		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	0	-	0	5	2.000.000	-	0	-	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01.0013 – Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				0		50.000.000		63.000.000		200.000.000		150.000.000		
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	0	30	50.000.000	50	63.000.000	100	200.000.000	75	150.000.000		
2.17.07.2.01.0014 – Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	-	-	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0		
2.17.07.2.01.0015 – Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				100.000.000		75.000.000		75.000.000		200.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	-	280	100.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	250	200.000.000	200	150.000.000		
2.17.08 – PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.717.878.565		1.817.878.565		1.892.878.565		1.912.878.565		1.932.878.565		
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya (%)	7	7,3	1.717.878.565	7,5	1.817.878.565	7,7	1.892.878.565	8	1.912.878.565	8,2	1.932.878.565	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
2.17.08.2.01 – Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1.717.878.565		1.817.878.565		1.892.878.565		1.912.878.565		1.932.878.565		
Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	1.717.878.565	-	1.817.878.565	5	1.892.878.565	-	1.912.878.565	-	1.932.878.565		
	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	-	-		-		100		125		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	200	620		630		650		650		650			
2.17.08.2.01.0002 – Pengembangan Usaha Mikro				1.717.878.565		1.817.878.565		1.817.878.565		1.817.878.565		1.857.878.565		
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	200	620	1.717.878.565	630	1.817.878.565	650	1.817.878.565	650	1.817.878.565	650	1.857.878.565		
2.17.08.2.01.0003 – Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				0		0		70.000.000		95.000.000		75.000.000		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	-	-	0	-	0	100	70.000.000	125	95.000.000	100	75.000.000		
2.17.08.2.01.0005 – Fasilitas Inkubator Usaha Mikro				0		0		5.000.000		0		0		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	0	-	0	5	5.000.000	-	0	-	0		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5.027.703.680		2.589.295.800		2.655.295.800		2.865.295.800		3.405.295.800		
3.30.02 – PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				33.407.880		50.000.000		55.000.000		65.000.000		65.000.000		
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (%)	100	50	33.407.880	60	50.000.000	70	55.000.000	70	65.000.000	80	65.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3.30.02.2.01 – Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.30.02.2.01.0002 – Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.30.02.2.02 – Penerbitan Tanda Daftar Gudang				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terfasilitasinya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	-	-	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.30.02.2.02.0001 – Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	-	-	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.30.02.2.03 – Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	-	-	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.30.02.2.03.0001 – Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	-	-	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.30.02.2.05 – Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				33.407.880		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terfasilitasinya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	33.407.880	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
3.30.02.2.05.0001 – Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				33.407.880		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	33.407.880	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
3.30.02.2.06 – Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0		0		0		5.000.000		0		
Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	-	-	0	-	0	-	0	1	5.000.000	-	0		
3.30.02.2.06.0003 – Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				0		0		0		5.000.000		0		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	-	-	0	-	0	-	0	1	5.000.000	-	0		
3.30.03 – PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.000.000.000		413.000.000		413.000.000		413.000.000		413.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)	100	100	3.000.000.000	100	413.000.000	100	413.000.000	100	413.000.000	100	413.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01 – Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.937.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	4	2.937.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000		
	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	-	-		-		-		1		1			
	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	-	-		-		-		1		1			
3.30.03.2.01.0001 – Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.791.970.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	4	2.791.970.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
3.30.03.2.01.0002 – Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				145.030.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	15	15	145.030.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000		
3.30.03.2.01.0003 – Pelaksanaan fasilitas terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terselenggarannya kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitas Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	-	-	0	-	0	-	0	1	0	1	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03.2.01.0004 – Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	-	-	0	-	0	-	0	1	0	1	0		
3.30.03.2.02 – Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		
Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	63.000.000	1	63.000.000	1	63.000.000	1	63.000.000	1	63.000.000		
3.30.03.2.02.0001 – Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000		
3.30.03.2.02.0002 – Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000	1	31.500.000		
3.30.04 – PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				1.117.000.000		1.304.000.000		1.305.000.000		1.310.000.000		1.310.000.000		
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu (%)	2	2	1.117.000.000	2	1.304.000.000	3	1.305.000.000	3	1.310.000.000	3	1.310.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.01 – Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				7.000.000		29.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya Jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12	12	7.000.000	12	29.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
3.30.04.2.01.0001 – Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				7.000.000		29.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12	12	7.000.000	12	29.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
3.30.04.2.02 – Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				1.110.000.000		1.270.000.000		1.275.000.000		1.275.000.000		1.280.000.000		
Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	1.110.000.000	5	1.270.000.000	5	1.275.000.000	5	1.275.000.000	6	1.280.000.000		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.30.04.2.02.0002 – Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				60.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000		
3.30.04.2.02.0003 – Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1.050.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	1.050.000.000	5	1.200.000.000	5	1.200.000.000	5	1.200.000.000	6	1.200.000.000		
3.30.04.2.03 – Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		5.000.000		0		5.000.000		0		
Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	-	-	0	1	5.000.000	-	0	1	5.000.000	-	0		
3.30.04.2.03.0003 – Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				0		5.000.000		0		5.000.000		0		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	-	-	0	1	5.000.000	-	0	1	5.000.000	-	0		
3.30.05 – PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				300.000.000		340.000.000		350.000.000		395.000.000		700.000.000		
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Persentase Peningkatan Fasilitas Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Ekspor (%)	100	100	300.000.000	100	340.000.000	100	350.000.000	100	395.000.000	100	700.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.05.2.01 – Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000		340.000.000		350.000.000		395.000.000		700.000.000		
Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	-	-	300.000.000	10	340.000.000	-	350.000.000	-	395.000.000	10	700.000.000		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	-	50		50		50		50		50			
3.30.05.2.01.0002 – Pameran Dagang Nasional				0		40.000.000		0		0		300.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	-	-	0	10	40.000.000	-	0	-	0	10	300.000.000		
3.30.05.2.01.0003 – Pameran Dagang Lokal				300.000.000		300.000.000		350.000.000		395.000.000		400.000.000		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	-	50	300.000.000	50	300.000.000	50	350.000.000	50	395.000.000	50	400.000.000		
3.30.06 – PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				377.295.800		282.295.800		282.295.800		312.295.800		317.295.800		
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	377.295.800	100	282.295.800	100	282.295.800	100	312.295.800	100	317.295.800	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3.30.06.2.01 – Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				377.295.800		282.295.800		282.295.800		312.295.800		317.295.800		
Meningkatnya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	18.000	11.000	377.295.800	11.500	282.295.800	12.000	282.295.800	12.500	312.295.800	13.000	317.295.800		
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	-	-		-		-		20		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.06.2.01.0001 – Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				377.295.800		282.295.800		282.295.800		282.295.800		282.295.800		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	18.000	11.000	377.295.800	11.500	282.295.800	12.000	282.295.800	12.500	282.295.800	13.000	282.295.800		
3.30.06.2.01.0002 – Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				0		0		0		30.000.000		35.000.000		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	-	-	0	-	0	-	0	20	30.000.000	25	35.000.000		
3.30.07 – PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				200.000.000		200.000.000		250.000.000		370.000.000		600.000.000		
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan Fasilitasi Pembinaan Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	370.000.000	100	600.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01 – Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				200.000.000		200.000.000		250.000.000		370.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	30	-	200.000.000	-	200.000.000	35	250.000.000	35	370.000.000	35	600.000.000		
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	75	50		50		70		70		70			
3.30.07.2.01.0005 – Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0		0		50.000.000		170.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	30	-	0	-	0	35	50.000.000	35	170.000.000	35	400.000.000		
3.30.07.2.01.0006 – Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	75	50	200.000.000	50	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.985.000.000		3.139.828.000		3.199.828.000		3.279.828.000		3.359.828.000		
3.31.02 – PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.915.000.000		3.049.328.000		3.109.328.000		3.119.328.000		3.199.328.000		
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil (%)	23,39	18	2.915.000.000	23	3.049.328.000	23	3.109.328.000	24	3.119.328.000	27	3.199.328.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3.31.02.2.01 – Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				2.915.000.000		3.049.328.000		3.109.328.000		3.119.328.000		3.199.328.000		
Tersusunnya Dokumen RPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	4	2.915.000.000	1	3.049.328.000	1	3.109.328.000	1	3.119.328.000	1	3.199.328.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	4		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
3.31.02.2.01.0001 – Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0		122.000.000		122.000.000		52.000.000		52.000.000		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	-	-	0	1	122.000.000	1	122.000.000	1	52.000.000	1	52.000.000		
3.31.02.2.01.0002 – Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				65.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	2	65.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
3.31.02.2.01.0003 – Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				700.000.000		576.000.000		576.000.000		576.000.000		576.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	4	700.000.000	1	576.000.000	1	576.000.000	1	576.000.000	1	576.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.2.01.0004 – Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.150.000.000		1.230.000.000		1.290.000.000		1.320.000.000		1.400.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	2	1.150.000.000	2	1.230.000.000	2	1.290.000.000	2	1.320.000.000	2	1.400.000.000		
3.31.02.2.01.0005 – Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				400.000.000		321.328.000		321.328.000		321.328.000		321.328.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	4	400.000.000	2	321.328.000	2	321.328.000	2	321.328.000	2	321.328.000		
3.31.02.2.01.0008 – Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				600.000.000		700.000.000		700.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	2	600.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000		
3.31.03 – PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Kepatuhan Usaha Industri Kecil Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku (%)	30	30	40.000.000	35	60.000.000	40	60.000.000	45	60.000.000	50	60.000.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03.2.01 – Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Meningkatnya Izin Industri yang Sesuai Ketentuan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	-	1	40.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000		
	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.03.2.01.0003 – Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal	1	1	20.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)													
3.31.03.2.01.0004 – Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				20.000.000		0		0		0		0		
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	-	1	20.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
3.31.04 – PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				30.000.000		30.500.000		30.500.000		100.500.000		100.500.000		
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Ketersediaan Data Industri Kecil Menengah pada Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (%)	50	50	30.000.000	50	30.500.000	50	30.500.000	50	100.500.000	50	100.500.000	2.17.3.30.3.31.07.0000 – DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3.31.04.2.01 – Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		30.500.000		30.500.000		100.500.000		100.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	-	-	30.000.000	-	30.500.000	-	30.500.000	1	100.500.000	1	100.500.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	-	-		-		-		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
3.31.04.2.01.0001 – Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				30.000.000		30.500.000		30.500.000		30.500.000		30.500.000		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	2	2	30.000.000	2	30.500.000	2	30.500.000	2	30.500.000	2	30.500.000		
3.31.04.2.01.0002 – Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				0		0		0		50.000.000		50.000.000		
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	-	-	0	-	0	-	0	1	50.000.000	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.04.2.01.0003 – Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				0		0		0		20.000.000		20.000.000		
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	-	-	0	-	0	-	0	1	20.000.000	1	20.000.000		

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

Tabel diatas menunjukkan keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029 guna mencapai target tujuan dan sasaran pada Renstra DKUMP. Adapun dalam pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tentunya dibutuhkan pendanaan, baik yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Pagu selama lima tahun ke depan juga berbeda, tergantung kebutuhan dan program prioritas yang ditetapkan. Adapun dasar pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Selain Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak juga mengampu target pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai upaya optimalisasi penerimaan PAD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menerapkan sistem pembayaran Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha dengan dua metode, yaitu:

1. Pembayaran secara tunai melalui penyetoran langsung ke Kas Daerah Kota Pontianak melalui teller bank yang ditunjuk;
2. Pembayaran secara non-tunai ke Kas Daerah Kota Pontianak, melalui:
 - ATM;
 - QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard);
 - Internet Banking;
 - Mobile Banking;
 - Dompot elektronik;
 - Rekening bendahara penerimaan; dan/atau
 - Mekanisme non-tunai lainnya.

Sistem pembayaran non-tunai ini menggunakan Virtual Account (VA) yang bekerja sama dengan Bank Kalbar. Prosesnya dimulai dari input tagihan dan piutang oleh DKUMP ke dalam dokumen tagihan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas, dokumen tersebut dikirim ke Bank Kalbar untuk diproses dan dimasukkan ke dalam sistem CMS. Nomor VA yang dihasilkan kemudian disampaikan kepada para pedagang di pasar rakyat binaan DKUMP dalam bentuk surat tagihan, yang memuat nomor VA dan besaran tagihan masing-masing.

Manfaat penggunaan VA dalam pembayaran retribusi:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Retribusi Daerah
Penggunaan VA memungkinkan proses penagihan dan pembayaran retribusi dilakukan secara sistematis dan otomatis. Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu serta rentan terhadap kesalahan input atau kehilangan data. Efisiensi kerja aparatur juga meningkat karena tidak perlu lagi melakukan penagihan door-to-door.
2. Mengurangi Potensi Kebocoran dan Penyimpangan
Penghapusan transaksi tunai secara langsung antara petugas dan pedagang meminimalisir risiko kebocoran penerimaan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Sistem digital menciptakan jejak audit yang jelas dan memudahkan proses pengawasan.

3. Mewujudkan Sistem Keuangan yang Transparan

Dengan integrasi sistem pembayaran VA ke sistem perbankan dan keuangan daerah, setiap transaksi tercatat secara real-time dan dapat dilacak.
4. Meningkatkan Kepatuhan Pedagang dalam Membayar Retribusi

VA memudahkan pedagang untuk melakukan pembayaran kapan saja dan dari mana saja. Dengan kemudahan ini, tingkat kepatuhan meningkat karena tidak ada alasan keterlambatan atau kesulitan teknis dalam melakukan pembayaran.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sistem yang lebih tertib, transparan dan mudah diakses mendorong peningkatan kepatuhan wajib retribusi. Penerimaan PAD menjadi lebih terukur, terprediksi, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pembiayaan program-program pembangunan daerah.
6. Memberikan Akses Data dan Informasi Secara Real-Time

Dengan sistem VA yang terintegrasi, DKUMP dapat memantau jumlah tagihan, piutang, dan realisasi pembayaran secara langsung.
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pedagang tidak perlu lagi mengantre atau meninggalkan tempat usahanya hanya untuk membayar retribusi. Pelayanan menjadi lebih cepat, modern, dan ramah pengguna, sehingga mendukung citra pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik yang adaptif dan responsif.

Berikut tabel berisi target pendapatan pada DKUMP Kota Pontianak tahun 2026 – 2030 :

TABEL 4.3 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

No	Uraian Pendapatan	2026	2027	2028	2029	2030
1	<i>Retribusi Pasar</i>	3,506,900,000	3,506,900,000	3,661,900,000	5,814,650,000	6,103,440,000
2	<i>Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Bangunan-Pasar)</i>	3,193,100,000	3,193,100,000	3,338,100,000	3,485,350,000	3,659,617,500
3	<i>Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan</i>	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Total	6,800,000,000	6,800,000,000	7,100,000,000	9,400,000,000	9,863,057,500

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DKUMP KOTA PONTIANAK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN				
1.	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
3.	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
4.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
5.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
6.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
7.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
8.	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
			3.30.02.2.05.0001 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
9.	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
10.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
11.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	
12.	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
13.	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
14.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
15.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
16.	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, maka ditetapkanlah beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029. Berdasarkan tabel diatas, ada sebanyak 16 Program Prioritas yang berkaitan dengan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian. Selain program prioritas diatas, ditetapkan juga Program Strategi

Nasional (Pro SN) yang merupakan program atau proyek unggulan prioritas pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya. Adapun Program Strategis Nasional yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan Kemiskinan diharapkan mampu dicapai oleh kegiatan Penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Rencana Aksi Koordinasi tempat berusaha untuk usaha mikro.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diharapkan akan tercapai oleh kegiatan :

- Pengendalian Inflasi dengan melaksanakan program:
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Rencana Aksi : Pemantauan dan analisa harga harian pada 5 (Lima) pasar Tradisional yang Terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dan Fasilitasi Bazar Murah sembako/komoditi pangan: Insidentil disaat ada komoditi bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Rencana Aksi : Sosialisasi, Bimtek, pelatihan dan Workshop
 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Rencana Aksi : Gebyar UMKM Workshop/Bimtek promosi dan pemasaran produk
 - Program Pengembangan Ekspor
Rencana Aksi : Pameran (Lokal/Nasional) dan Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM
- Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melaksanakan program:
 - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Rencana Aksi : Identifikasi Pembentukan Koperasi Merah Putih di 29 Kelurahan di Kota Pontianak
 - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Rencana Aksi : Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi
- Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan) dengan melaksanakan program:
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Rencana Aksi : Pembangunan Rumah Packaging untuk pelaku usaha

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DKUMP KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN									
1.	Proporsi Jumlah usaha Mikro	%	80,56	90	91,25	92,5	93,75	95	95	
2.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,215	0,32	0,4	0,47	0,55	0,62	0,68	
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,9	4,97	5,04	5,12	5,19	5,26	5,33	
4.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	15,5	14,55	14,27	13,98	13,7	13,41	12,96	
5.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	18,48	18,5	18,92	19,42	19,92	20,42	20,92	
6.	Tingkat Inflasi	(%)	1,58	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
7.	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri pengolahan	%	13,60	13,88	13,88	15,27	15,27	16,65	16,65	
8.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	84	84	84	85	85	87	87	
10.	Tingkat Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	82,5	83,5	83,5	84,5	84,5	85	85,5	

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau program mencapai tujuannya dalam jangka waktu tertentu. IKU memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif program atau kebijakan yang telah diterapkan. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan suatu strategi atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra DKUMP Tahun 2025 - 2029. Terdapat 11 IKU yang diemban oleh DKUMP selama 5 tahun kedepan. Adapun IKU tersebut berasal dari Indikator Tujuan (No 1-6) dan Sasaran (No 7-11) yang telah ditetapkan pada Renstra DKUMP Tahun 2025-2029.

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DKUMP KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Presentase Koperasi yang berkualitas	positif	%	42,53	42,53	43,68	44,83	45,98	47,13	48,28	
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.	Persentase kinerja realisasi pupuk	positif	%	73,12	73,5	74	74,5	75	75,5	76	
4.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	%	117,8	100	100	100	100	100	100	
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	positif	%	20,5	22,5	23,5	25,5	26,5	27,5	28,5	
7.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	positif	%	23,39	24,59	24,78	24,89	25	25,45	25,8	
9.	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini	positif	%	125	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Olahan data DKUMP Kota Pontianak

Indikator Kinerja Kunci adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai kinerja OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 3 urusan yang diemban oleh DKUMP Kota Pontianak yakni; Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan serta Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Adapun IKK yang diemban DKUMP Kota Pontianak berjumlah 10 dimana indikator tersebut ditetapkan berdasarkan indikator LPPD. IKK ditetapkan berdasarkan indikator dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang mana IKK menjadi tolok ukur untuk mengukur keberhasilan dalam setiap urusan pemerintahan, seperti yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. LPPD sendiri berisi data dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan IKK yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

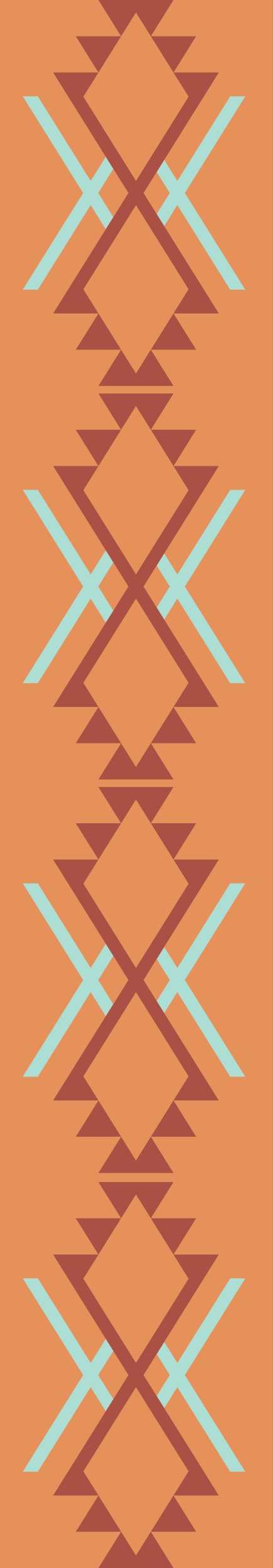
Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Misi RPJMD Kota Pontianak ke 4 tahun 2025 – 2029 yaitu **"Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif"**.


WALI KOTA PONTIANAK,

RUSDI KAMTONO



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak

Email : dkump@pontianak.go.id

Website : diskumdag.pontianak.go.id